

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH

Dyah Palupiningtyas¹⁾, Nina Mistriani²⁾, Tuwuh Adhistyo Wijoyo³⁾

Email : ¹⁾dyah.stiepari@gmail.com, ²⁾ninamistriani.stiepari@gmail.com,

³⁾zefanya.adhistyo@gmail.com

^{1,3)} Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang ²⁾ Program Studi Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengamatan lingkungan internal dan eksternal yang diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan pengamatan. Teknik analisis data menggunakan beberapa prosedur pengurangan data, tampilan data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata dalam kegiatan ekonomi dapat bermanfaat bagi masyarakat tentunya dengan adanya SDM Pariwisata pada lingkungan internal pariwisata melalui pokdarwis. Sedangkan lingkungan eksternal mulai dari adanya gagasan yang berawal dari pemerintah.

Kata kunci: *Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal, Pariwisata, dan Ekonomi.*

Abstract

This study aims to analyze the internal and external environment observations that are expected to affect economic activity in local communities. This research was conducted with a qualitative approach with a descriptive model. Data collection techniques carried out through documentation and observation. The data then analyzed using several data reduction procedures, data displays, and conclusions. The results showed that tourism success in economic activities could benefit the community, of course, with the existence of Tourism HR in the internal environment of tourism through Pokdarwis. In contrast, the external environment starts with ideas originating from the government.

Keywords: *Internal Environmental, External Environmental, Tourism, and Economy.*

PENDAHULUAN

Kekayaan alam Indonesia menyimpan banyak potensi sekaligus peluang berharga untuk membangun kepariwisataan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desa maupun kota masing-masing. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan (Sumedi, Simatupang, Sinaga, & Firdaus, 2016).

Menurut Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2018 yaitu Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 akhirnya dapat menembus di bawah satu digit, yaitu 9,82 persen pada bulan Maret

dan terus menurun menjadi 9,66 persen pada bulan September yang lalu. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi. Banyak negara di dunia dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan pariwisata memiliki dampak trickle down effect bagi masyarakat lokal (Rosiadi, Setiawan, & Moko, 2018).

Kepedulian dan komitmen, serta peran pemerintah dalam upaya pengelolaan masyarakat di bidang kepariwisataan telah diatur dan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 pengganti UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa dampak yang diakibatkan dari pengembangan kepariwisataan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pelestarian lingkungan. Sebagai upaya nyata, pada tahun 2010-2017, pemerintah Indonesia giat mencanangkan Visit Indonesia sebagai upaya mempromosikan destinasi

pariwisata Indonesia kepada wisatawan mancanegara maupun lokal (Bappenas, 2018). Tahun kunjungan tersebut mampu menarik wisatawan mancanegara maupun lokal untuk berwisata di Indonesia.

Sejak adanya kebijakan tentang kepariwisataan itulah, pengembangan desa-desa wisata di Indonesia mulai bermunculan. Salah satunya adalah Jawa Tengah yang merupakan daerah tujuan wisata nasional kedua. Tak ketinggalan kabupaten Demak Jawa tengah berlomba-lomba menggali potensi lokal untuk merintis desa wisata berbasis budaya, alam maupun ekonomi. Hal ini juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal, Jawa Tengah mampu menunjukkan eksistensi dan prestasi nasional di sektor pembangunan pariwisata.

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sedang mengembangkan potensi pariwisata adalah Kabupaten Demak. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa Kabupaten Demak tidak banyak memiliki tempat wisata khas. Namun, seiring perkembangan pembangunan, kabupaten tersebut ternyata mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pangan. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar serta terbuka untuk dikembangkan. Daya tarik wisata Kabupaten Demak merupakan perpaduan harmonis antara kekayaan alam, kebudayaan tradisional, dan cara hidup masyarakatnya. Kabupaten Demak telah mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dengan beberapa kebijakan yang telah diambil. Salah satu kebijakan Pemkab Demak di bidang kepariwisataan ialah pengembangan destinasi pariwisata di kawasan Penangkaran burung hantu atau Desa Wisata Tlogoweru. Terbukti daya tarik wisata Penangkaran burung hantu mulai ramai didatangi wisatawan dalam dan luar negeri pada saat itu. Pengelolaan hal tersebut berdampak pada kunjungan wisata, namun di sisi lain menguatkan antar pengelola wisata maupun masyarakat.

Kabupaten Demak yang memiliki potensi alam dan budaya yang sangat besar. Potensi tersebut saat ini telah dimanfaatkan sebagai atraksi wisata (*tourist attraction*) dengan cara dikembangkan dan dikelola secara profesional. Pengembangan potensi-potensi wisata tersebut tidaklah terlepas dari campur tangan pihak pengelola sebagai inisiator dalam rangka mewujudkan Kabupaten Demak banyak diminati wisatawan. Selain lokasinya yang masih alami dan asri, Desa Wisata dikelola kelompok sadar wisata. Dengan demikian penelitian bertujuan untuk melakukan investigasi dampak internal dan eksternal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Demak Jawa Tengah.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang terbentuknya desa wisata dan menjelaskan trickle down effect pariwisata dapat berkembang (Ridjal, 2006). Dari berbagai faktor pengamatan internal dengan melihat potensi daya tarik, bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan masyarakat yang

dilakukan oleh pengelola yaitu Pokdarwis dan melalui pengembangan desa wisata. Peneliti menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan penuh makna, holistik, kompleks dinamis, sehingga peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya dibagi dalam 3 kluster yaitu:

1. Pemerintah
 - a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Demak dan Staffnya.
 - b. Fasilitator PNPM Mandiri Pariwisata Kabupaten Demak.
 - c. Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
2. Pengelola Wisata
 - a. Ketua Kelompok Sadar Wisata.
 - b. Ketua Pemandu.
3. Masyarakat dan Pengunjung
 - a. Penjual Makanan dan Kerajinan.
 - b. Tokoh Masyarakat.
 - c. Masyarakat sekitar.
 - d. Pengunjung wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Demak yang memiliki luas 89.743 Ha dan terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. 512 dusun, 6.326 Rukun Tetangga (RT) dan 1.262 Rukun Warga (RW). Wilayah Kabupaten Demak memiliki luas 89.743 Ha. Adapun batas administrasinya meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- d. Sebelah Barat : Kota Semarang

Adapun beberapa potensi kebudayaan pariwisata sejarah/budaya seperti potensi: Sejarah kerajaan Demak, Peninggalan Kepurbakalaan, Keaneka ragam kesenian, baik dari rumpun maupun jenis kesenian dan festival, Nilai-nilai Tradisional, Permuseuman, Bahasa, Aksara, dan Sastra dan Seni Kriya. Masyarakat Demak yang Agraris, Seni budaya yang mengakar di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Potensi wisata Kabupaten Demak terdiri dari berbagai jenis wisata yaitu wisata alam, sejarah, keluarga, religi, belanja, pertunjukan, seni budaya, kuliner khas, dan konservasi alam.

Pengamatan Terhadap Aspek Lingkungan Internal

Hasil penilaian dan kajian terhadap aspek lingkungan internal yaitu:

- a. Faktor-faktor lingkungan Internal yang mempunyai kekuatan peluang untuk pengembangan potensi wisata di Kawasan Pariwisata Kabupaten demak, seperti:
 - 1) Potensi seni budaya yang mengakar pada masyarakat.
 - 2) Potensi alam, sebagai unsur wisata lingkungan dan petualangan.

- 3) Demak berdekatan dengan pintu gerbang tujuan wisatawan.
 - 4) Perhatian Pemerintah Daerah dalam bidang pariwisata dinyatakan pariwisata sebagai salah satu visi.
 - 5) Kawasan pendidikan Samata sebagai sebagai salah satu visi dan unsur stimulasi promosi Demak
 - 6) Memiliki potensi alam/wisata, seni dan budaya tradisi yang beraneka ragam dan peninggalan sejarah serta atraksi wisata.
 - 7) Potensi ekonomi pariwisata relatif besar dan menjanjikan untuk meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
 - 8) Dengan Otonomi Daerah, PEMDA akan mampu meningkatkan pembangunan destinasi baru khususnya pengembangan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana wisata.
 - 9) Adanya master plan atau rencana pengembangan pariwisata Kabupaten demak secara terpadu (RIPPDA Kabupaten demak).
 - 10)Telah tersedianya standar, pedoman teknis, kriteria dan prosedur pengelolaan kebudayaan dan pariwisata.
 - 11)Adanya sarana informasi kepariwisataan bagi masyarakat.
 - 12)Adanya jalinan kerja sama antara Pemerintah Daerah, pelaku pariwisata dan komponen pariwisata untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pembangunan pariwisata.
 - 13)Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi untuk melakukan promosi.
 - 14)Tersedianya sumber daya manusia kepariwisataan.
 - 15)Tersedia fasilitas pendukung yang memadai seperti hotel, restoran, perbankan, dll.
 - 16)Adanya sarana transportasi yang mendukung ke Kabupaten demak.
 - 17)Keramahtamahan penduduk atau masyarakat Kabupaten demak.
 - 18)Keamanan dan stabilitas yang cukup baik.
 - 19)Pelayanan umum (polisi, Kantor pos, telepon) yang baik.
- b. Faktor-faktor yang dianggap sebagai kelemahan dari peluang pengembangan potensi wisata di Kawasan Pariwisata Kabupaten demak, seperti:
- 1) Daya tarik wisata kurang memiliki daya saing baik dari sisi fasilitas, penataan lingkungan dan pengolahan
 - 2) Beberapa ruas jalan menuju daya tarik wisata baik alam maupun budaya kurang memadai (jalan pengerasan/tanah)
 - 3) Arus lalu lintas dari ibu kota kabupaten dengan kawasan wisata Demak berjauhan
 - 4) Kurangnya aksesibilitas menuju obyek wisata dan daya tarik wisata potensial
 - 5) Kekayaan kesenian belum secara optimal dimanfaatkan, terutama bagi pagelaran kesenian yang regular dan bersifat setiap saat dapat disajikan
 - 6) Perlindungan terhadap Benda-benda Cagar Budaya (BCB) yang tersebar di berbagai tempat belum terintervikasi dan perlindungan hukum
 - 7) Promosi pariwisata Demak sangat terbatas dan peran promosi masih dianggap sebagai sesuatu yang mahal dan mubassir
 - 8) Belum efektifnya kegiatan pemasaran produk dan paket wisata terpadu
 - 9) Lemahnya investasi swasta sektor pariwisata, berakibat kepada kurang berkembangnya usaha pariwisata
 - 10)Kurang tersosialisainya standar, pedoman teknis, kriteria dan prosedur pengembangan nilai budaya.
 - 11)Database kebudayaan dan pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang aktual
 - 12)Masih rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk lokal
 - 13)Belum optimalnya peran masyarakat dan insan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan
 - 14)Belum optimalnya pola kemitraan masyarakat di bidang kepariwisataan
 - 15)Terbatasnya sumber daya manusia professional dan memadai yang dapat meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten demak
 - 16)Rendahnya pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata
 - 17)Belum adanya produk usaha jasa dan sarana yang berdaya saing tinggi
 - 18)Kuantitas dan kualitas barang-barang cinderamata yang dijual masih sangat terbatas
 - 19)Biro perjalanan atau paket wisata yang melayani wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif belum memadai dan masih sangat terbatas.
- c. Faktor-faktor yang dianggap sebagai ancaman bagi pengembangan potensi wisata di Kawasan Pariwisata Kabupaten demak, seperti:
- 1) Kelestarian lingkungan akan terancam oleh kepentingan lain yang menghasilkan pendapatan lebih besar.
 - 2) Kawasan Demak yang memiliki kekuatan pasar wisatawan akan menjadi kekuatan pasar daerah lain yaitu Demak akan menjadi Tourist Generating bagi daerah lain.
 - 3) Promosi yang kurang gencar berakibat kepada kelesuan bisnis usaha pariwisata.
 - 4) Masyarakat Demak akan kehilangan nuansa ke-Demakan tanpa pemulian dan pengkayaan budaya Demak.
 - 5) Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal masih rendah antara lain karena keterbatasan informasi.
 - 6) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian (BCB) benda cagar budaya.

- 7) Lemahnya SDM pengelola peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal, serta pengelolaan daya tarik wisata.
- 8) Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan aspek kepentingan dan manfaat bagi masyarakat lokal.
- 9) Adanya kesamaan potensi kepariwisataan dengan daerah lain.
- 10) Masuknya pengaruh budaya asing yang berkembang di masyarakat.
- 11) Meningkatnya minat masyarakat sendiri untuk melakukan perjalanan wisata ke daerah lain.

Berdasarkan uraian hasil identifikasi dan klasifikasi situasi terhadap aspek internal dan eksternal organisasi maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah indikator yang selanjutnya disebut isu strategis yang dihadapi dan berpengaruh terhadap pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Demak. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program di lapangan apakah terdapat kesesuaian atau tidak antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebelumnya dengan hasil evaluasi terhadap program-program tersebut nantinya. Dengan demikian, Dinas kebudayaan dan pariwisata telah melaksanakan tahapan kegiatan berupa analisis situasi terhadap lingkungan internal dan eksternal agar dapat mengetahui kriteria-kriteria dalam menentukan serta melakukan pemetaan terhadap isu-isu strategis dalam internal-eksternal organisasi sehingga dapat lebih memberikan efektivitas terhadap tujuan-tujuan organisasi.

Identifikasi Isu Strategis Kegiatan identifikasi isu-isu strategis terkait faktor-faktor lingkungan organisasi yang terkait dengan isu aktual yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini bertujuan untuk memenuhi faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan solusinya. Untuk pencapaian tujuan dengan pencapaian tingkat kinerja yang diinginkan, maka hambatan-hambatan tersebut perlu menjadi pertimbangan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal organisasi. Berdasarkan hasil observasi terhadap pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten demak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah isu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten demak.

Strategi Pengembangan Potensi Kepariwisataan

Berdasarkan uraian hasil identifikasi terhadap isu-isu strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memiliki dan merupakan potensi yang dapat dijadikan peluang jangka panjang yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten demak, tetapi di sisi lain peluang tersebut masih sangat minim untuk dipandang sebagai alat untuk penguatan terhadap kekuatan yang ada agar dapat memaksimalkan visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan-tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara lebih maksimal dan komprehensif, terutama dalam perumusan dan pengambilan strategi dan pengembangan alternatif-

alternatif strategi serta variasinya. Dalam hal ini, minat, ekspektasi, preferensi, golongan umur, jenis kelamin wisatawan sangat mempengaruhi kecenderungan tingkat perkembangan pariwisata (Kusworo & Damanik, 2002).

Strategi pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata meliputi: Aspek Regulasi. Penguatan Instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pariwisata dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi pariwisata. Kelemahan yang mendasar pada birokrasi tidak lain adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Pada pemerintahan sekarang ini, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai, karena masalah birokrasi. Jika hendak mengatasi masalah itu, kita perlu membangun sistem koordinasi yang diwajibkan UU agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran pariwisata serta efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal ini Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Rimba Alam A.Pangerang, M.Si, yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah sebagai fasilitator turut mendukung dengan kebijakan melalui regulasi atau peraturan daerah yang dapat mengakomodasi industri pariwisata di Kabupaten demak". Demikian pula keterangan yang diungkapkan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Andi Baso Makkulau, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan perannya, pemerintah harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Selain itu juga di dukung oleh industri-industri pendukung pariwisata lainnya".

Berkenaan dengan otonomisasi daerah, dalam pelaksanaan pembangunan dituntut adanya fungsi pengawasan secara optimal pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah Kabupaten demak. Dimana Belum optimalnya pengawasan secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan efektifitas dan pengendalian pembangunan kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten demak perlu membuat peraturan daerah (PERDA) yang terkait dengan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya dan sejarah. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata (Badarab, Trihayuningtyas, & Suryadana, 2017).

Dengan demikian, diharapkan pengelola pariwisata yang masih menggunakan manajemen tradisional akan lebih terbuka, aspiratif, dan sinergis dengan masyarakat setempat. Dengan mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah dalam upaya penyiapan regulasi terhadap pengembangan pariwisata berupa PERDA dan peraturan pendukung lain, fungsi pengawasan dan keterlibatan dunia usaha dalam investasi pariwisata serta penyediaan

infrastruktur pendukung pariwisata. Aspek Manajemen Pembangunan Sarana Prasarana DTW yang menunjang dan mencakup pengembangan infrastruktur kawasan wilayah pariwisata. Peningkatan dukungan sarana prasarana serta infrastruktur pendukungnya guna menunjang aksesibilitas objek dan atau kawasan yang telah ada. Adanya sarana dan prasarana yang representatif pada kawasan site wisata merupakan daya tarik tertentu untuk dikunjungi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Namun, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum memadai.

Meningkatkan mekanisme pola jaringan kemitraan masyarakat dan pengembangan peran serta aktif serta pengelolaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata setempat (Hutomo, 2000). Dalam usaha pengembangan kebudayaan dan Pariwisata di daerah Kabupaten demak, keterlibatan hubungan kemitraan stakeholder yang berbasis kerakyatan saat ini belum optimal. Oleh karena pengembangan usaha pariwisata dan budaya diarahkan kepada adanya kebersamaan dan kesadaran dalam pengembangan suatu kawasan usaha wisata, dan nilai-nilai kebudayaan dan peninggalannya. Di dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat, maka kebijakan pengembangan yang dilakukan diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, salah satu strategi adalah bagaimana memberdayakan budaya lokal, mutu lingkungan dan memberdayakan kreativitas masyarakat. Hal ini berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Bejo Mulyo M.Si, yang menyatakan bahwa: "Dampak pembangunan daerah diharapkan pula dapat terlihat dampaknya kepada masyarakat, apakah dunia pariwisata dapat menunjang kehidupan masyarakat dan mengetahui kekurangan yang ada untuk segera di benahi."

Dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal, maka akan lebih terjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat serta bagaimana membuat suatu kawasan wisata yang mampu membuka peluang pelibatan aktif masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan industri pariwisata. Dengan demikian, berbagai terobosan atau inovasi dalam pengembangan pariwisata ini akan memberikan nilai terhadap pengembangan daerah dan pengelolaan masyarakat. Pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat, wilayah, dan selanjutnya perlu didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal
2. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal
3. Berorientasi pada pengembangan wiraswasta berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja tinggi dan berorientasi pada teknologi kooperatif

4. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif seminim mungkin
5. Menciptakan suatu produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pariwisata yang berbekal modal budaya untuk memperoleh kemandirian dan kesejahteraan ekonomi sendiri.

Hal itu menuntut adanya perhatian yang lebih dari para pengambil kebijakan sektor pariwisata untuk mempertimbangkan kembali pola pengembangan kawasan wisata agar masyarakat sekitar lebih dapat merasakan manfaatnya. Dengan kata lain bagaimana membuat suatu kawasan wisata yang mampu membuka peluang pelibatan aktif masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan industri pariwisata bukan hanya sekedar sebagai obyek.

Penetapan Visi Organisasi yang Efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat ditempuh dengan cara menetapkan kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program ini merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Sedangkan kegiatan operasional merupakan penjabaran dari program. Penjabaran program dan kegiatan ini memiliki tingkat kerincian yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan. Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten demak. Program yang ada dibagi ke dalam program SKPD dan program kewilayahan. Program ini dilengkapi dengan indikator terukur dalam pencapaian hasilnya.

Arah, Titik Berat dan Sasaran Pengembangan

Dari rumusan kebijakan pengembangan kepariwisataan yang telah dikemukakan di atas, maka pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan yang dilakukan, arah, dan sasaran pengembangannya dijabarkan, sebagai berikut:

1. Arah Pengembangan
 - a. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan program dan prioritas rencana pengembangan kepariwisataan secara terpadu antara instansi terkait, dengan didukung kemampuan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas pengembangan penyelenggaraan urusan kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Pembinaan pemasyarakatan asset pariwisata daerah perlu diarahkan kepada usaha untuk lebih memperkenalkan kekayaan budaya dengan tetap ditunjang sebagai usaha pengembangan atas daya tarik wisata dengan jalan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada setiap kawasan obyek wisata yang ada.

- c. Pengembangan daya tarik wisata perlu diarahkan kepada penetapan daya tarik wisata andalan dengan didukung peningkatan mutu atas kondisi sarana dan prasarana yang ada serta diikuti oleh upaya pelestarian lingkungan hidup.
 - d. Pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan atas sumber penerimaan daerah perlu diarahkan pada penyempurnaan dan peningkatan unsur bina wisata, pemasaran produk wisata serta penetapan peraturan daerah mengenai izin usaha dalam pengelolaan pada suatu kawasan wisata.
2. Titik Berat Pengembangan
 - a. Titik berat bidang obyek dan atraksi wisata yakni:
 - 1) Melakukan peningkatan usaha penggalian dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan yang berkaitan dengan atraksi budaya, permainan rakyat dan kesenian tradisional serta tata adat dengan tetap memperhatikan pengembangan daya wisata lainnya. Di dalam menciptakan tingkat hubungan keserasian dan keselarasan guna mendukung kemajuan pembangunan daerah, maka titik berat dimaksud disertai dengan upaya pembinaan kemampuan aparatur serta kesadaran masyarakat dalam semua lapisan sampai pada tingkat pemerintahan kelurahan dan desa.
 - 2) Perlunya pengendalian pertumbuhan usaha di bidang rekreasi dan hiburan umum dalam rangka menunjang pengembangan kepariwisataan daerah.
 - b. Titik berat bidang sarana wisata
 - 1) Peningkatan mutu pengelolaan hotel dan rumah makan.
 - 2) Usaha pembinaan secara simultan dilakukan bekerjasama dengan satuan-satuan organisasi hotel dan rumah makan.
 - c. Titik berat bidang promosi wisata yaitu peningkatan mutu informasi, bimbingan dan pemasaran daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata alam maupun daya tarik minat khusus. Untuk mencapai peningkatan mutu dimaksud, maka titik berat pengembangan bidang promosi wisata ini perlu didukung dengan pola kerjasama terpadu antara pihak pemerintah daerah, swasta maupun satuan-satuan organisasi pengendalian dan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
 3. Sasaran Pengembangan
 - a. Sasaran bidang daya tarik wisata
 - 1) Penciptaan bentuk atraksi daya tarik wisata budaya sebagai daya tarik wisata andalan daerah sesuai latar belakang kesejarahan yang dimiliki dalam rangka menjadikan Kabupaten demak sebagai pusat pengembangan budaya di Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Peningkatan mutu dan daya tarik wisata alam melalui pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas yang dimiliki guna menunjang pengembangan wisata minat khusus, rekreasi dan hiburan umum.
 - b. Sasaran bidang sarana wisata
 - 1) Menumbuhkembangkan mutu perusahaan jasa perhotelan baik yang dikelola oleh badan usaha maupun perorangan berdasarkan syarat kesehatan, kebutuhan jumlah dan luas kamar, fasilitas serta syarat lain yang berkaitan dengan prosedur perizinan yang ada.
 - 2) Menumbuhkembangkan mutu dan syarat pelayanan rumah makan berdasarkan syarat kesehatan makanan dan minuman serta fasilitas lain yang berkaitan dengan prosedur perizinan yang berlaku.
 - c. Sasaran bidang promosi dan pemasaran wisata
 - 1) Peningkatan atas mutu penyelenggaraan promosi wisata daerah terhadap produk-produk daya tarik wisata unggulan maupun usaha penyebarluasan informasi wisata melalui media cetak dan audio visual.
 - 2) Peningkatan mutu dan jumlah pendistribusian media informasi wisata daerah, baik yang berbentuk brosur, leaflet, buletin maupun poster-poster kepada pengelola jasa hotel, biro perjalanan wisata dan atau ketempat-tempat lokasi daya tarik wisata di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dijelaskan secara deskriptif di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terbentuknya desa wisata di Kabupaten Demak berawal dari gagasan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta bantuan Program PNPM Mandiri Pariwisata, kemudian dikelola masyarakat setempat dengan tantangan dari pihak-pihak yang kurang mendukung adanya desa wisata. Justru hal tersebut menjadi tantangan bukan penghalang. Dengan kata lain, pemerintah membangunkan tidur panjang masyarakat dengan mendorong dan memfasilitasi adanya Desa Wisata dalam pengembangan pariwisata
2. Pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini Pokdarwis diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi wisata. Pengelolaan masyarakat dalam bidang tersebut adalah dengan menyelenggarakan, a) pertemuan, b) pendampingan, c) bantuan modal sebagai stimulan, d) pembangunan sarana prasarana, e) pembentukan kelompok sadarwisata (Pokdarwis), f) kerja bakti, g) Pemasaran. Hal ini relevan dengan teori bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan masyarakat terdapat beberapa tambahan poin penting yang belum diungkapkan pada teori tersebut, misalnya pemasaran dan kerja bakti seperti yang terjadi pada beberapa Desa Wisata, sedangkan, Pengimplementasian bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Pengembangan Desa Wisata berdampak pada bidang ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan baru. Desa Wisata dengan ikonnya ternyata dapat membawa berkah kesejahteraan bagi warga sekitar setelah adanya upaya pengelolaan wisata.
4. Pengembangan Desa Wisata memiliki dampak sosial-budaya mencakup peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata, pelestarian kebudayaan lokal berupa pelestarian seni wayang beber yang sudah langkaditemukan di Jawa, namun di sisi lain menimbulkan konflik perebutan kepengelolaan.

Saran

Dari rumusan masalah dan hasil penelitian, maka saya dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah segera mengesahkan dan mensosialisasikan Perda Pengelolaan Pariwisata agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan di daya tarik wisata.
2. Diharapkan pemerintah daerah berperan aktif dan tegas dalam melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik agar menyelesaikannya dengan kearifan lokal serta sesuai hukum yang berlaku, sedangkan para pihak yang bersengketa mau bermusyawarah dengan kesepakatan bersama yang logis serta tidak ada kepentingan yang merugikan masyarakat.
3. Diharapkan adanya pelatihan up grading pemandu dan pendampingan yang berkelanjutan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk senantiasa meningkatkan kualitas SDM pengelola, masyarakat maupun pemasaran desa wisata.
4. Diharapkan pemerintah dan pengelola memperhatikan dan melibatkan peran serta kaum perempuan dalam kepengelolaan desa wisata, sehingga ada peran dan keterlibatan kaum perempuan, seperti di bidang kuliner maupun pemandu wisata.
5. Diharapkan pemerintah, pengelola dan masyarakat harus memperhatikan kelestarian alam, kelestarian budaya, dan pemerataan peran serta masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, maupun agama yang dianut agar terhindar dari pengaruh negatif dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badarab, F., Trihayuningtyas, E., & Suryadana, M. L. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah. *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 7(2), 97–112.
- Bappenas, K. P. P. N. (2018). *Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas*.
- Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat*

dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Jakarta: Bappenas.

- Kusworo, H. A., & Damanik, J. (2002). Pengembangan SDM pariwisata: Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 105–120.
- Ridjal, T. (2006). *Metode bricolage dalam penelitian sosial. Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rosiadi, A., Setiawan, M., & Moko, W. (2018). Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi pada Organisasi Sektor Publik. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 6(2), 156–169. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2208>
- Sumedi, N., Simatupang, P., Sinaga, B. M., & Firdaus, M. (2016). Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 31(2), 97–113. <https://doi.org/10.21082/jae.v31n2.2013.97-113>
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan